

**RANCANGAN AKHIR**  
**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BAGOR**  
**KABUPATEN NGANJUK**  
**TAHUN 2018 - 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**KECAMATAN BAGOR**  
**TAHUN 2019**



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa Puji Syukur Kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan HidayahNya, sehingga dapat terselenggaranya penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk merupakan Rencana Strategis yang memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 ( Lima ) tahun mendatang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan masyarakat Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Demikian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan sebagai acuan dan perbaikan bagi kegiatan kita semua. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dalam penyusunan rencana strategis di masa yang akan datang.

Bagor, 2019  
a.n. BUPATI NGANJUK  
CAMAT BAGOR



**K A S N O, S.Sos**

Penata Tingkat 1

NIP. 19630317 198202 1 003

## **DAFTAR ISI**

**Hal**

**Kata Pengantar** 2

**Daftar Isi** 3

**BAB I PENDAHULUAN**

5

1.1 Latar Belakang 5  
1.2 Landasan Hukum 7  
1.3 Maksud dan Tujuan 9  
1.4 Sistematika Penulisan 9

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

11

2.1 Gambaran Organisasi 11  
2.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Bagor 11  
2.1.2 Kedudukan Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi 14  
2.1.3 Sumber Daya Kecamatan Bagor 22  
2.1.3.1 Berdasarkan Jabatan Struktural 22  
2.1.3.2 Pegawai Kecamatan Bagor Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang 23  
2.1.3.3 Pegawai Kecamatan Bagor Berdasarkan Tingkat Pendidikan 24  
2.1.3.4 Sarana Dan Peralatan Kerja Utama 24  
2.2. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bagor 26

2.3.	Kinerja Keuangan Kecamatan Bagor	33
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS</b>	
	36	
3.1.	Permasalahan	
	36	
3.2.	Telahaan Visi , Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk	38
3.3	Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	38
3.4	Isu – Isu Strategis	39
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	42
4.1	Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Bagor	42
4.2	Sasaran	43
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	45
5.1	Strategi Kecamatan Bagor	45
5.2	Arah Kebijakan	46
<b>BAB VI</b>	<b>PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN</b>	48
6.1	Indikator Kinerja	49
6.2	Kelompok Sasaran	49
6.3	Kegiatan	50
6.4	Pendanaan Indikatif	52
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	58
7.1	Indikator Kinerja Utama (IKU)	59
7.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	61
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	63

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan lebih mengedepankan pada penguatan prinsip - prinsip demokrasi, optimalisasi peran serta masyarakat, perwujudan pemerataan dan keadilan sosial serta perhatian yang

tinggi terhadap potensi dan keanekaragaman daerah. Konsekuensinya, pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan berkewajiban lebih transparan dan bertanggung jawab dalam rangka implementasi proses-proses pembangunan yang dilaksanakan.

Salah satu bentuk akuntabilitas pemerintahan yang dimaksud, diwujudkan melalui penyajian perencanaan stratejik pada setiap unit Perangkat Daerah (OPD). Rumusan perencanaan stratejik berfungsi sebagai pijakan awal untuk mewujudkan tujuan jangka menengah organisasi. Rumusan perencanaan stratejik pada satuan unit kerja senantiasa mengacu pada rumusan perencanaan stratejik pada organisasi/institusi induk dan mengacu pada rumusan perencanaan jangka panjang.

Sebagai salah satu fungsi dari OPD, Kecamatan dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan OPD lainnya dan elemen masyarakat madani dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya agar usulan kebutuhan terhadap berbagai akses kehidupan yang dijangkau melalui proses partisipasi bertemu dengan proses teknokratik yang dilakukan oleh OPD yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah lokal.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bagor tahun 2018-2023 yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Bagor pada dasarnya dilatar belakangi oleh kebutuhan atau kondisi yang dipaparkan diatas dan keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta untuk turut mendukung

suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023, sebagai penjabaran dari visi misi Bupati terpilih.

Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Bagor, maka disusunlah Renstra sebagai satu bagian utuh dari manajemen pembangunan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Renstra Kecamatan Bagor memuat keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan Tujuan dan sasaran yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dokumen Renstra Kecamatan Bagor pada prinsipnya merupakan perencanaan jangka menengah OPD sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika internal maupun eksternal. Disamping itu, tuntutan peningkatan layanan publik menjadi realitas faktual yang tidak bisa dihindarkan. Proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bagor ini diawali dengan identifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD, melakukan tujuan dan sasaran organisasi serta penetapan Indikator Kinerja, melakukan perhitungan formulasi untuk menemukan realisasi tahun berjalan, menentukan trend dan target jangka menengah.

Dengan adanya dokumen Renstra Kecamatan ini, diharapkan setiap OPD mampu melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja secara objektif sehingga aparatur mampu mengelola secara efektif dan efisien pencapaian tujuan yang hendak dicapai organisasi dalam kurun waktu lima tahunan.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**



Renstra Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis OPD, RKPD dan Rencana Kerja OPD ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Nganjuk Tahun 2005 - 2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

16. Peraturan Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya rencana strategis Kecamatan Bagor ini adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Bagor guna mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya rencana strategis Kecamatan Bagor ini adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan dimasa akan datang;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Nganjuk khususnya Kecamatan Bagor ;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi Misi, Sasaran, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan;

4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk disusun dengan sistematika penulisan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.5 Latar Belakang
- 1.6 Landasan Hukum
- 1.7 Maksud dan Tujuan
- 1.8 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Gambaran Organisasi
  - 2.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Bagor
  - 2.1.2 Kedudukan Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi
  - 2.1.3 Sumber Daya Kecamatan Bagor
    - 2.1.3.1 Berdasarkan Jabatan Struktural
    - 2.1.3.2 Pegawai Kecamatan Bagor Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
    - 2.1.3.3 Pegawai Kecamatan Bagor Berdasarkan Tingkat Pendidikan
    - 2.1.3.4 Sarana Dan Peralatan Kerja Utama
  - 2.2. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bagor
  - 2.3. Kinerja Keuangan Kecamatan Bagor

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS**

- 3.1. Permasalahan
- 3.2. Telaahan Visi , Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk
- 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4 Isu – Isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Bagor

4.2 Sasaran

**BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

5.1 Strategi Kecamatan Bagor

5.2 Arah Kebijakan

**BAB VI PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN**

6.1 Indikator Kinerja

6.2 Kelompok Sasaran

6.3 Kegiatan

6.4 Pendanaan Indikatif

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

**BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN BAGOR**

#### **2.1 Gambaran Organisasi**

##### **2.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Bagor**

Kecamatan Bagor merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Nganjuk yang terletak di bagian barat wilayah Kabupaten Nganjuk. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Rejoso, sebelah selatan dengan Kecamatan Berbek, sebelah timur dengan Kecamatan Nganjuk, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wilangan.

Secara administratif Kecamatan Bagor terdiri dari 19 Desa dan 2 Kelurahan yaitu:

1. Desa Balongrejo
2. Desa Ngumpul
3. Desa Pesudukuh
4. Desa Buduran
5. Desa Gandu
6. Desa Sekarputih
7. Desa Girirejo
8. Desa Karangtengah
9. Desa Paron
10. Desa Kerepkidul
11. Desa Gemenggeng
12. Desa Sugihwaras
13. Desa Kutorejo
14. Desa Banarankulon
15. Desa Banaranwetan
16. Desa Petak

- 17. Desa Bagorkulon
- 18. Desa Kendalrejo
- 19. Desa Selorejo
- 20. Kelurahan Kedondong
- 21. Kelurahan Guyangan

**Tabel 2.1**  
Jumlah Desa dan Jarak

<b>No</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Kecamatan ( Km )</b>	<b>Pasar ( Km )</b>
1	Balongrejo	6	5
2	Girirejo	8	4,5
3	Pesudukuh	6	3,5
4	Sekarputih	6	2
5	Buduran	6	2,5
6	Ngumpul	3,5	3,5
7	Bagorkulon	0,8	0,8
8	Petak	0,1	0,2
9	Paron	0,5	0,5
10	Karangtengah	1,5	1,5
11	Selorejo	2	2
12	Gandu	6	3
13	Guyangan	4,5	1
14	Kedondong	5	2
15	Sugihwaras	6,5	0,5
16	Kutorejo	5	1
17	Kerepkidul	4	0,5
18	Gemenggeng	5,8	1
19	Kendalrejo	2	2
20	Banarankulon	3	3
21	Banaranwetan	4	4

Sedangkan jumlah penduduk 61.491 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
Penduduk Kecamatan Bagor

<b>No</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Balongrejo	1.706	1.975	3.681
2	Girirejo	1.673	1.648	3.321
3	Pesudukuh	1.652	1.777	3.429
4	Sekarputih	1.117	1.133	2.250
5	Buduran	701	724	1.425
6	Ngumpul	2.319	2.442	4.761
7	Bagorkulon	1.815	1.878	3.693
8	Petak	955	1.049	2.004
9	Paron	990	1.000	1.990
10	Karangtengah	1.106	1.152	2.258
11	Selorejo	2.294	2.378	4.672
12	Gandu	1.287	1.303	2.590
13	Guyangan	850	1.036	1.886
14	Kedondong	949	1.034	1.983
15	Sugihwaras	1.580	1.599	3.179
16	Kutorejo	876	911	1.787
17	Kerepkidul	1.217	1.262	2.479
18	Gemenggeng	1.139	1.300	2.439
19	Kendalrejo	932	940	1.872
20	Banarankulon	2.704	2.771	5.475
21	Banaranwetan	2.183	2.134	4.317
	<b>Jumlah</b>	<b>30.045</b>	<b>31.446</b>	<b>61.491</b>

### 2.1.2 Kedudukan Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi



Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk yaitu *“Menyeleggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah”*.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

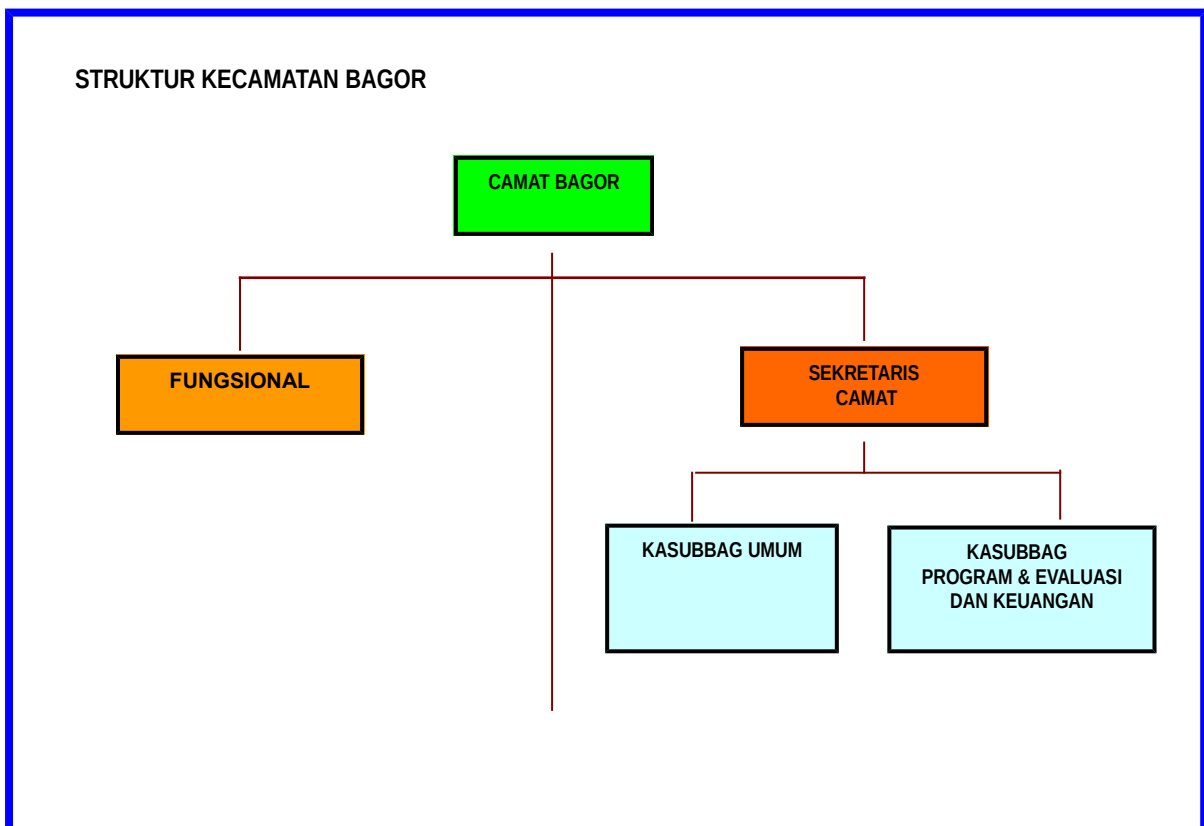
- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa/atau kelurahan;

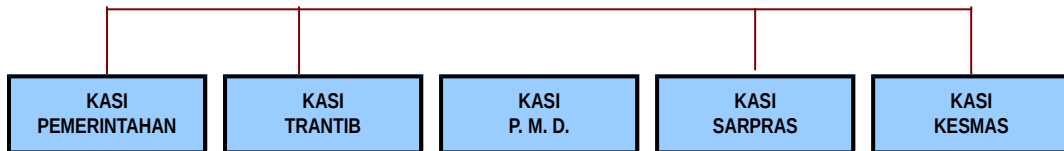
- h. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Struktur Organisasi

Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk merupakan Satuan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Nganjuk.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:





Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut :

### **I. Camat.**

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- h. melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Camat dibantu oleh staf yang terbentuk dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagai berikut :

(1) Camat, membawahi:

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Tata Pemerintahan;
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Seksi Sarana dan Prasarana;
- e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Seksi-seksi masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat.

## **II. SEKRETARIAT**

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan, dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana program, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan;
2. pengelolaan urusan keuangan;
3. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian, dan tata usaha perlengkapan;
4. pelaksanaan urusan rumah tangga;
5. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas, Sekretariat membawahi :

1. Sub. Bagian Umum
2. Sub. Bagian Program, Evaluasi dan Keuangan.

Sub. bagian-sub. bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1. Sub. bagian Umum mempunyai tugas pokok:

- 1).Mengelola urusan surat-menyurat, ekspedisi, dan kearsipan;
  - 2).Mengelola urusan rumahtangga dan keprotokolan;
  - 3).Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan
  - 4).Melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
  - 5).Melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan, dan pelayanan administrasi kepegawaian;
  - 6).Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
2. Sub.bagian Program, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas pokok:
- 1).Melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
  - 2).Melaksanakan pengelolaan keuangan;
  - 3).Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - 4).Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

### **III. SEKSI TATA PEMERINTAHAN**

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian dengan satuan perangkat kerja daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan;
- c. pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;

- d. pemberian bimbingan, super tujuan, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan ;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- g. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
- h. pembuatan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **IV. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan, dan penegakan perundang-undangan.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian dengan instansi terkait atau tokoh masyarakat mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. pengoordinasian dengan satuan perangkat kerja daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- c. pengoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. pembuatan laporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan kepada Bupati.

## **V. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (PMD)**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- a. pemberian dorongan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. pembuatan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa kepada Bupati dengan tembusa kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **VI. SEKSI SARANA DAN PRASARANA**

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan dibidang sarana dan prasarana.

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. Pengordinasian dengan perangkat daerah dan instansi vertical dibidang sarana dan prasara ;
- b. Pengordinasian dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang sarana dan prasarana ;
- c. Pemberian bimbingan, supervise, fasilitas dan konsultasi dibidang sarana prasarana ;
- d. Pembinaan dan pengawasan dibidang sarana dan prasarana ;
- e. Pembuatan laporan penyelenggaraan kegiatan koordinasi dibidang sapras ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **VII. SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ( KESRA )**

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan kesejahteraan masyarakat.

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan, dan melakukan bimbingan/pembinaan serta koordinasi bidang kesejahteraan masyarakat;
- b. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan bimbingan/pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat;
- c. pelaksanaan kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan, dan penyaluran bantuan sosial kemasyarakatan;
- d. pengoordinasian dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan, dan penyaluran bantuan sosial kemasyarakatan;
- e. Pengordinasian dengan pemerintah desa dan /kelurahan dibidang penerimaan PBB – P2
- f. pembuatan laporan kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat dan PBB – P2 kepada Bupati;
- g. pelaksanaan tugas-RAH tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.



- VII. LURAH
- IX. SEKRETARIS KELURAHAN
- X. KALI PEMERINTAHAN N
- XI. KASI SARANA DAN PRASARANA
- XII KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

### 2.1.3 Sumber Daya Kecamatan Bagor

Sumber Daya Manusia pada Kantor Pemerintah Kecamatan Bagor adalah sebagai berikut :

#### 2.1.3.1 Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Bagor telah terisi sebanyak 8 orang dari 9 jabatan struktural yang ada serta dibantu oleh 7 orang staf. Untuk pejabat di Kelurahan sejumlah 5 orang dari 10 jabatan struktural serta 3 orang JFU. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**  
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Bagor  
Berdasarkan Jabatan Tahun 2017

Jabatan	Eselon	Jumlah Pejabat	Jumlah Jabatan
Camat	III-A	1	1
Sekretaris Kecamatan	III-B	1	1
Kepala Seksi	IV-A	5	5
Kepala Sub Bagian	IV-B	1	2
Lurah	IV-A	2	2
Sekkel	IV-B	1	2
Kasi di Kelurahan	IV -B	5	10
Fungsional umum di Kecamatan	-	7	
Fungsional umum di	-	3	

Kelurahan			
JUMLAH		26	23

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Bagor Tahun 2017

### **2.1.3.2 Pegawai Kecamatan Bagor Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang.**

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Bagor sebagai berikut :

**Tabel 2.2**

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Bagor  
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2017

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jml. Pegawai
1.	Pembina	IV/a	1
2.	Penata Tk. I	III/d	10
3.	Penata	III/c	3
4.	Penata Muda Tk. I	III/b	2
5.	Penata Muda	III/a	1
6.	Pengatur Tk. I	II/ d	1
7.	Pengatur	II//c	7
8.	Pengatur Muda Tk. I	II//b	1
9.	Pengatur Muda	II/a	1
<b>Jumlah</b>			<b>27</b>

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Bagor Tahun 2017

### **2.1.3.3 Pegawai Kecamatan Bagor Berdasarkan Tingkat Pendidikan.**

Tingkat pegawai Kecamatan Bagor dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Bagor  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2017

No.	Pendidikan	Golongan Ruang
1.	S2	5
2.	S1	9
3.	DIV	-
4.	D3	-
5.	SMA	13
6.	SMP	-
7.	SD	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>27</b>

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Bagor Tahun 2017

### **2.1.3.4 Sarana Dan Peralatan Kerja Utama**

Keberadaan sarana dan peralatan kerja yang mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi :

1. Tanah untuk Kantor
2. Gedung Kantor 1 (satu) unit yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat:
3. Sarana alat transportasi yang meliputi :
  - Roda empat 1 (satu) buah terdiri dari :
    - 1 unit Izusu Panther Tahun 2014
  - Roda dua 46 ( empat puluh enam ) unit terdiri dari :
    - 1 unit Yamaha VIXION Tahun 2014
    - 1 unit Honda Win Tahun 1997
    - 1 unit Honda Supra X Tahun 2007
    - 21 unit Honda Win Tahun 2005
    - 19 unit Honda VERZA Tahun 2014
    - 3 unit Honda Supra X 125 Tahun 2014
4. Peralatan inventaris kantor lainnya berupa dalam kondisi baik dan layak digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :
  - Meja Kerja : 30 buah
  - Meja Panjang Pelayanan : 2 buah
  - Kursi Rapat : 60 buah
  - Bangku rapat Panjang : 3 buah
  - Komputer khusus KTP SIAK : 1 (satu) unit
  - Komputer e-KTP : 1 (satu) unit (depdagri)
  - Laptop : 3 ( tiga) unit,
  - Komputer : 4 (empat) unit
  - Printer : 4 (empat) unit
  - Telepon : 1 (satu) unit

- Rak Kayu	: 3 (tiga) unit
- Filing besi	: 3 (tiga) unit
- Brangkas	: 1 (satu)
- Lemari Slorok	: 2 (dua) unit
- Papan visuil	: 2 (dua) unit
- Lcd Proyektor	: 1 (dua) unit
- Lemari kayu	: 8 (delapan) unit
- Ac	: 3 (tiga) unit
- Sound system	: 1 (satu) unit
- Power suply	: 2 (dua)
- Mimbar Podium	: 1 (satu)

## **2.2 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BAGOR**

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Bagor dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan
- Peningkatan dan optimalisasi kinerja satuan unit kerja.

Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas terhadap kinerja Kecamatan Bagor, berikut ini dijelaskan kinerja Kecamatan Bagor per bidang pelayanan yaitu :

**Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :**

- 1) Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa dan kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
- 2) Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat Kelurahan, desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
- 3) Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa dan Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling;
- 4) Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran From Pimpinan Kecamatan dan Dinas atau Instansi terkait;
- 5) Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban antara lain ; Operasi PKL, , Waria dan operasi pelajar serta operasi penyakit masyarakat (PEKAT) bersama Muspika dan instansi terkait;
- 6) Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
- 7) Melaksanakan PAM tahun baru oleh tim gabungan dari Polri, Dishub, TNI, PMK, Satpol PP dan Puskesmas;
- 8) Dan melaksanakankegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran;.
- 9) Mengikuti sertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan

meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa/kelurahan;

- 10) Melakukan Perencanaan dan Pengawasan Terhadap Pemilihan Kepala Desa
- 11) Mengadakan pembinaan PBB-P2 terhadap petugas rayon di desa/kelurahan.
- 12) Mengadakan pekan panutan PBB-P2 di desa/kelurahan.
- 13) Memberikan penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang lunas sebelum jatuh tempo.
- 14) Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan (satu pintu);
- 15) Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Bagor ;
- 16) Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
- 17) Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas sekatap dan para sekretaris desa;
- 18) Mengadakan Rapat koordinasi beserta Lurah, Kepala Desa, Sekretaris Desa se Kecamatan Bagor setiap hari Senin setelah pelaksanaan apel pagi;.
- 19) Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan, kelurahan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
- 20) Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
- 21) Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Bagor ;

- 22) Peningkatan kedisiplinan perangkat desa/kelurahan;
- 23) Pembinaan kelengkapan administrasi desa/kelurahan termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa/kelurahan;
- 24) Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
- 25) Pembinaan secara rutin ke desa/kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.

#### **Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan Masyarakat**

- 1) Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);
- 2) Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
- 3) Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa/kelurahan;
- 4) Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
- 5) Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;
- 6) Monitoring pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan dan melaksanakan musrenbang kecamatan;



- 7) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
- 8) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa/kelurahan dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
- 9) Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Bagor ;
- 10) Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Sanitasi Masyarakat (SANIMAS);
- 11) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera;
- 12) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
- 13) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;

#### **Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Masyarakat**

- 1) Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin).
- 2) Monitoring penyaluran Jamkesgakin;
- 3) Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
- 4) Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
- 5) Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
- 6) Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- 7) Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;

- 8) Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
- 9) Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

**Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bagor  
Kabupaten Nganjuk**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI OPD	TARGET RENSTRA OPD TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian dan surat menyurat	900	1200	1500	1800	1920	828	1164 surat	1410 Surat	1728 surat	874 surat	92 %	97 %	94 %	96 %	45,52 %
2	Jumlah koordinasi bidang ketertiban dan keamanan yang dilaksanakan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Jumlah desa/kelurahan yang menyusun buku profil desa/kelurahan	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Jumlah peserta musrenbang kecamatan yang hadir	115	115	115	115	115	104	102	110	112	107	91 %	89 %	96 %	98 %	93,04 %
7.	Jumlah pelayanan legalisasi surat menyurat dan pelayanan kependudukan ( KTP, KK, Surat Pindah Keluar dan Masuk)	1500	1620	1680	1800	2100	1380	1458	1545	1692	952	92 %	90 %	92 %	94 %	45,33 %

**Tabel 2.5**  
**CAPAIAN KINERJA 5 TAHUN SEBELUMNYA (RENSTRA 2014 S.D 2018)**

Capaian Kinerja 5 th periode lalu	indikator	Formulasi penghitungan	Rencana					Realisasi Capaian					Ket
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
Pelayanan umum	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Hasil survei kepuasan masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	2. Meningkatkan fasilitas dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	$\frac{\text{Jumlah Kelurahan yang tertib perencanaan, penganggaran dan pelaporan}}{\text{Jumlah seluruh Kelurahan}} \times 100$	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	60 % (8)	70 % (9)	70 % (9)	75 % (10)	75 % (10)	2 Kel Semua indikator tercapai tetapi belum tepat waktu

Peningkatan koordinasi trantibum		$\frac{\text{Jumlah Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik}}{\text{Jumlah seluruh Desa}} \times 100$	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2 Desa
Pemberdayaan masyarakat	3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan	$\frac{\text{Jumlah lingkungan RT cantik}}{\text{Jumlah seluruh RT}} \times 100$	6 % (40 RT/RW)	10 % (66 RT/RW)	14 % (92 RT/RW)	17 % (112 RT/RW)		6 % (30 RT DAN 1 RW= 37 RT)	9 % (53 RT 2 RW= 63 RT)	14 % (57 RT 4 RW = 92 RT)	18 % (95 RT 6 RW= 102 RT)		531 RT/ 129 RW Indikator tercapai tetapi ada RT yang belum sesuai criteria
	lingkungan hidup	$\frac{\text{Jumlah SD MI berwawasan LSS}}{\text{Jumlah seluruh SD MI}} \times 100$	15 % (5 SD/MI)	30 % (11 SD/MI)	45 % (17SD)	60 % (23 SD)		15 % (5 SDI)	30 % (11 SD)	59 % (20 SD)	73 % (28SD)		41 SD/MI (6 gugus)
		$\frac{\text{Jumlah TK RA berwawasan LSS}}{\text{Jumlah seluruh TK RA}} \times 100$	12 % (5 TK/Ra)	26 % (19 TK/Ra)	40 % (14TK/Ra)	54 % (18 TK/Ra)		14 % (4 TK/Ra)	51 % (17 TK/Ra)	70 % (24 TK/Ra)	84 % (29TK/Ra)		43 TK/RA (7 gugus)

### **2.3 KINERJA KEUANGAN KECAMATAN BAGOR**

Pencapaian target Renstra Kecamatan Bagor tahun 2014 – 2018 diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sehingga untuk mengukur pencapaian kinerja dapat dilihat dari anggaran dan realisasi pendanaan yang dilaksanakan pada Renstra sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bagor  
Kabuten Nganjuk**

N O	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Pada Tahun					Rata – Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	77.851.000	61.690.000	61.690.000	56.842.275	78.145.000	75.690.731	58.176.471	58.518.692	74.293.421	37.762.089	97,23%	94,30%	94,85%	91,49%	43,32%	72.115.600	66.919.659
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	62.599.000	51.853.000	54.250.000	302.081.850	121.900.000	62.587.000	51.849.000	54.239.000	63.101.663	53.541.052	99,52%	99,99%	99,97%	98,13%	70.981.000	61.634.140	

3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan	1.635.200	162.579.070	434.138.827
		1.900.000	185.455.120	496.525.350
		48,00%	49,30%	56,95%
		100%	96,24%	-
		100%	84,52%	-
		99,96%	87,52%	-
		99,87%	94,99%	-
		1.680.000	105.946.300	268.524.008
		1.500.000	202.561.700	477.150.080
		1.500.000	177.894.350	
		1.499.500	172.799.800	
		1.498.000	92.050.000	
3.500.000	214.930.000	471.525.000		
1.575.000	159.609.660	521.525.700		
1.500.000	210.445.200	-		
1.500.000	197.445.200	-		
1.500.000	94.000.000	-		
4	Program Pembinaan Pemerintah, Kelembagaan dan Masyarakat Desa	162.579.070	185.455.120	496.525.350
		48,00%	49,30%	56,95%
		100%	96,24%	-
		100%	84,52%	-
		99,96%	87,52%	-
		99,87%	94,99%	-
		1.680.000	105.946.300	268.524.008
		1.500.000	202.561.700	477.150.080
		1.500.000	177.894.350	
		1.499.500	172.799.800	
		1.498.000	92.050.000	
		3.500.000	214.930.000	471.525.000
1.575.000	159.609.660	521.525.700		
1.500.000	210.445.200	-		
1.500.000	197.445.200	-		
1.500.000	94.000.000	-		
5	Program Peningkatan Kinerja Kelurahan	162.579.070	185.455.120	496.525.350
		48,00%	49,30%	56,95%
		100%	96,24%	-
		100%	84,52%	-
		99,96%	87,52%	-
		99,87%	94,99%	-
		1.680.000	105.946.300	268.524.008
		1.500.000	202.561.700	477.150.080
		1.500.000	177.894.350	
		1.499.500	172.799.800	
		1.498.000	92.050.000	
		3.500.000	214.930.000	471.525.000
1.575.000	159.609.660	521.525.700		
1.500.000	210.445.200	-		
1.500.000	197.445.200	-		
1.500.000	94.000.000	-		

Sumber : LRA Kecamatan Bagor 2014-2018



### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BAGOR

##### 3.1. PERMASALAHAN

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Bagor menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / *Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Hasil analisis sebagai berikut :

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Ketersediaan Data	Data belum tersusun secara sistematis dan akurat	<ul style="list-style-type: none"><li>- Minimnya personil</li><li>- Kurangnya Kesadaran pentingnya data</li></ul>
2.	Personil	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jumlah sangat minim</li><li>- Lemah dalam pemanfaatan Teknologi informasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Belum terisinya beberapa jabatan struktural/fungsional</li><li>- Kurangnya kesadaran pentingnya teknologi informasi</li></ul>
3.	Partisipasi Masyarakat	Belum optimal dalam proses perencanaan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kurangnya peran tokoh masyarakat</li><li>- Adanya kebijakan Pemerintah yang kurang berpihak pada masyarakat</li><li>- Kurangnya pelayanan prima kepada masyarakat</li></ul>

4.	Pelimpahan sebagian kewenangan Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat	Belum dapat dilaksanakan secara optimal dan belum disertai juklak serta juknis	- Pertentangan kepentingan masyarakat serta tuntutan/ aspirasi masyarakat yang semakin beragam
----	---	--	--

Dari gambaran tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Permasalahan OPD Kecamatan Bagor adalah :

- a. Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi agar sebanding dengan fasilitas yang tersedia ;
- b. Lemahnya manajemen informasi data kecamatan yang disebabkan karena kurangnya jumlah personil ;
- c. Kecamatan Bagor jauh lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian dan merupakan wilayah perkotaan sehingga struktur masyarakatnya semakin kritis dan proaktif terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas sehingga diperlukan kewenangan yang sedikit lebih luas dengan pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dari bupati kepada Camat :
- d. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang menuntut Pemberian pelayanan prima kepada masyarakat secara maksimal :
- e. Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama dikawasan perkotaan, dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualisme sehingga diperlukan aparat yang berkompetensi tinggi agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segala bidang .

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati**

Kecamatan Bagor memiliki tugas dan fungsi yang jika dikaitkan dengan visi- Bupati dan Wakil Bupati lima tahun ke depan Mewujudkan Kabupaten Nganjuk Yang Maju Dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Bangun Deso Noto Kuto) dan khususnya pada misi ketiga, diperoleh gambaran sebagai berikut :

1. Misi : Memperkuat Kinerja Birokrasi bersih, professional, dan Akuntabel Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik yang Berkualitas Dan Pro Rakyat (Maju Dan Bermartabat)

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi tersebut adalah :

- a. Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif;
- b. Meningkatkan sistem pelayanan publik;
- c. Meningkatkan upaya pencegahan dalam memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan.

### **3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nganjuk 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030, maka Kecamatan Bagor termasuk sebagai kawasan yang strategis jika ditinjau dari :

- a. Sistem pusat pelayanan perkotaan, maka kecamatan Bagor sebagai pusat pengembangan kecamatan.
- b. Sistem jaringan transportasi, maka jalan kecamatan Bagor termasuk jalan provinsi dan jalan kabupaten yang merupakan jalan kolektor dan local primer/sekunder.
- c. Sistem jaringan sumber daya air khususnya system pengembangan waduk dan embung, penyediaan sumber daya air bersih, dan pengembangan system jaringan air bersih
- d. Kawasan lindung khususnya kawasan rawan bencana alam
- e. Kawasan budidaya hutan produksi dan hutan rakyat
- f. Kawasan peruntukan pertanian khususnya peternakan
- g. Kawasan peruntukan pertambangan dan perindustrian

Dari adanya potensi tersebut diatas, diharapkan Kecamatan Bagor menjadi kawasan yang dapat diandalkan keberadaannya diwilayah Kabupaten Nganjuk.

Sedangkan berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bahwa wilayah Kecamatan Bagor merupakan wilayah yang Produktif terdiri dari sumberdaya alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia sehingga perlu adanya pengelolaan lingkungan hidup khususnya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau dan juga pengawasan lingkungan hidup terkait dengan semakin banyaknya perindustrian di Kecamatan Bagor yang diharapkan dengan adanya pengelolaan dan pengawasan lingkungan

hidup tersebut dapat menekan dan meminimalisir adanya pencemaran lingkungan hidup.

### **3.4 ISU - ISU STRATEGIS**

Aspek-aspek strategis Kecamatan Bagor diperoleh dengan mengakomodasi isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan pada RPJMD Kabupaten Nganjuk 2014-2018, yaitu **“Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik”**

Dari isu strategis tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan tugas pada Kecamatan Bagor terdapat beberapa permasalahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelimpahan wewenang serta urusan penyelenggaraan pemerintahan Umum ke Kecamatan ;
2. Dinamika masyarakat perkotaan yang menuntut pemberian pelayanan prima kepada masyarakat dari aparatur sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang dapat partisipasi masyarakat dalam pembangunan ;
3. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia ;
4. Lemahnya manajemen informasi data kecamatan disebabkan keterbatasan jumlah sumber daya aparatur terutama aparatur yang berada di unit organisasi yaitu di Desa dan Kelurahan ;

Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II ditelaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup di Kecamatan Bagor bahwa ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;
- 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility ( CSR )*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima

tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

- 4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

Atau secara singkat dapat disimpulkan bahwa isu strategis Kecamatan Bagor adalah sebagai berikut :

- 1.** Tantangan potensi gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan modern yang individualis
- 2.** Regulasi tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang perlu segera diterbitkan
- 3.** Peninggalan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kecamatan yang perlu ditingkatkan

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BAGOR**

#### **4.1 TUJUAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN BAGOR**

Pemerintah Kecamatan Bagor menyusun tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun sistem operasional dan prosedur untuk mencapainya. Dengan tujuan dan sasaran yang jelas dan tepat, diharapkan Pemerintah Kecamatan Bagor dapat menelaraskan antara potensi, peluang, tantangan dan kendala yang dihadapi.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk adalah **Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Tugas Kecamatan.**

Dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki Lebih dari itu, perumusan tujuan strategi ini memungkinkan Pemerintah Kecamatan Bagor mengukur sejauh mana Tujuan dan Sasaran organisasi telah dicapai. Untuk itu agar dapat tujuan strategi yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur.



Adapun tujuan Strategi Pemerintah Kecamatan Bagor adalah :

**Peningkatan Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Tugas Kecamatan**

**4.2 SASARAN**

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 ( lima ) tahun jangka pembangunan menengah adalah :

- Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan. Indicator nilai SKM hasil survey
- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa/Kelurahan.

Tujuan dan sasaran Kecamatan Bagor yang akan dicapai periode 5 (lima) tahunan jangka pembangunan menengah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1.

### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator	Data Capaian Tahun Awal	Target Akhir Periode Renstra	Sasaran	Indikator	Data Capaian Tahun Awal	Target					
			2018	2023			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	83	88	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	IKM (berdasarkan survey kepuasan masyarakat)	83	84	85	86	87	88	
			79 %	84 %	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa/Kelurahan yang baik	Prosentase desa/Kelurahan yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik	79 %	80 %	81 %	82 %	83 %	84 %	

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN BAGOR**

#### **5.1 Strategi Kecamatan Bagor**

Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan dalam Bab IV diatas, maka ditetapkan strategi pembangunan yaitu Penguatan Peran Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan terutama dalam meningkatkan kompetensi SDM, menjaga kualitas sarana dan prasarana kantor dalam mendukung eksistensi organisasi pemberi layanan. Dengan memperhatikan strategi pembangunan diatas, maka kebijakan pembangunan diarahkan untuk penguatan peran kelembagaan Kecamatan dan kelurahan/Desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Adapun strategi yang diambil oleh pimpinan Kecamatan Bagor dalam memastikan tujuan dan sasaran 5 ( lima ) tahun ke depan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di kecamatan dan di desa/kelurahan antara lain :

1. Mengadakan koordinasi lintas Sektoral se Wilayah Kecamatan Bagor
2. Mengadakan Pembinaan terhadap Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan
3. Memfasilitasi Pembangunan Infrastruktur di Desa/Kelurahan melalui Musrenbang, Program ADD dan Dana Desa
4. Memfasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Desa/Kelurahan melalui Program RASKIN dan PKH/BLT
5. Melaksanakan Kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun
6. Melaksanakan Bimbingan Teknis/Pembinaan Aparatur
7. Pengadaan Barang sesuai dengan Kebutuhan

8. Pemanfaatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara optimal
9. Menyusun Monografi Kelurahan dan Desa sesuai dengan kondisi yang ada saat ini
10. Menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Informatif

## **5.2 Arah Kebijakan**

Kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dan berdasarkan penjabaran tujuan dan sasaran Kecamatan Bagor, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang baik guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dari Tingkat Kecamatan sampai dengan Tingkat Desa/Kelurahan.
3. Meningkatkan Administrasi Perkantoran sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Efektifitas pelaksanaan musrenbang tingkat desa dan kecamatan dengan pendekatan perencanaan partisipatoris.
5. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan.
6. Pengembangan pelayanan publik bersinergi dengan para stakeholder guna mendukung pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah.
7. Meningkatkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat serta meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama.



Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Lima Tahun Mendatang sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5**

<p>Visi : Mewujudkan Kabupaten Nganjuk Yang Maju Dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Bangun Deso Noto Kuto)</p>			
<p>Misi : Memperkuat Kinerja Birokrasi bersih, professional, dan Akuntabel Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik yang Berkualitas Dan Pro Rakyat (Maju Dan Bermartabat)</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengadakan Survey tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib</li> <li>Melaksanakan Bimbingan Teknis/Pembinaan Aparatur tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar</li> <li>Melakukan pengawasan dan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang kontinuitas dan berkelanjutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dari Tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan</li> <li>Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku</li> <li>Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Sistem Pelaporan</li> </ul>

**Tujuan , Sasaran , Strategi , dan Kebijakan**

## **BAB VI**

### **PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN**

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Bagor selama 5 ( Lima ) tahun ke depan ( 2019 – 2023 ) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam tujuan dan sasaran Kecamatan Bagor yaitu **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Yang Prima**. Untuk selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Bagor akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk selama 5 ( Lima ) tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Program pembangunan dalam 5 ( lima ) tahun mendatang diarahkan untuk mencapai tujuan dengan kebijakan penguatan peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan.
- d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- f. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
- g. Program Peningkatan Kinerja Kelurahan.
- h. Program Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahann dan Pemberdayaan Masyarakat

### **6.1. INDIKATOR KINERJA**

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Bagor berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/OPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, Indikator Kinerja Kecamatan Bagor disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

### **6.2. KELOMPOK SASARAN**

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Bagor adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPTB/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap



perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Bagor yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2019– 2023.

### **6.3. KEGIATAN**

Adapun penjabaran dari program-program tersebut diatas, telah disusun berbagai Kegiatan, antara lain :

#### **2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- b. Penyediaan alat tulis kantor
- c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- d. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- f. Penyediaan makanan dan minuman
- g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- i. Pengadaan peralatan dan bahan kebersihan

#### **3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**

- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- c. Pengadaan mebeleur
- d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
- h. Pemeliharaan Rutin / Berkala mebeleur
- i. Rehabiltasi sedang/berat Gedung Kantor

**4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**

- a. Penyusunan Pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
- b. Penyusunan Perencanaan kegiatan dan Anggaran
- c. Penyusunan Pelaporan Pronogsis dan realisasi Anggaran
- d. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
- e. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

**4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- a. Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani
- b. Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan Publik

**5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- a. Seminar dan Lokakarya

**6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan**

- a. Pembinaan Pemerintahan , Kelembagaan dan masyarakat desa/kelurahan
- b. Pembinaan 10 Ptrogram Pokok PKK
- c. Peringatan Hari besar Nasional , Daerah , dan Keagamaan
- d. Penyusunan Monografi Kecamatan dan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- e. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
- f. Fasilitasi Musrenbang Desa/ Kelurahan
- g. Pembinaan Administrasi dan pengeloaan keuangan desa
- h. Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat
- i. Pembinaan dan pemantauan Pendapatan Daerah

- j. Koordinasi dan pengendalian Keamanan dan ketertiban masyarakat
- k. Koordinasi dan pembinaa bidang Sarpras
- l. Pelestarian Adat
- m. Pembinaan Linmas dan Satpol PP

**7. Program Peningkatan Kinerja Kelurahan**

- a. Penyediaan Operasional Rutin Perkantoran
- b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- c. Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan Kelurahan

**8. Program Pembinaan Pemerintahan Desa/ Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat**

- a. Pembinaan Tata Kelola Perencanaan , Keuangan , Aset dan pertanggung jawabban Desa / Kelurahan
- b. Pembinaan Administrasi dan Data Desa
- c. Monitoring evaluasi kinerja pemerintahan Desa
- d. Pembinaan Lingkungan Sehat

**6.4. PENDANAAN INDIKATIF**

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bagor bersumber pada dana APBD Kabupaten Nganjuk. Namun bagi Instansi lain seperti UPTD Pertanian, Peternakan, Pendidikan mendapat dana dari APBD Provinsi maupun DAK dari Instansi induknya.

**Tabel 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA , KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD					
							Tar-get	Rp (000)	Tar-get	Rp (000)	Tar-get	Rp (000)	Tar-get	Rp (000)	Tar-get	Rp (000)	Tar-get	Rp (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
Meningkatkan kualitas pelayanan yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</b>	1	20	02	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>99.410.600</b>	<b>82%</b>	<b>113.335.000</b>	<b>84%</b>	<b>130.390.000</b>	<b>86%</b>	<b>138.820.00</b>	<b>88%</b>	<b>150.230.000</b>	<b>88%</b>	<b>150.230.000</b>	Sekretariat	Kec. Bagor
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa telpon ,internet,istik dan air	4 jenis	4 unit	23.195.000	4 unit	26.135.000	4 unit	39.280.000	4 unit	42.400.000	4 unit	44.300.000	4 unit	44.300.000		
						Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	35 unit	30 jenis	10.000.000	29 jenis	13.700.000	31 jenis	15.240.000	34 jenis	16.800.000	36 jenis	18.750.000	36 jenis-	18.750.000		
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2 jenis	2 jenis	1.500.000	2 jenis	1.700.000	2 jenis	1.900.000	2 jenis	2.450.000	2 jenis	2.950.000	2 jenis	2.950.000		
						Penyediaan Komponen instalasi listrik	Jumlah Alat Listrik yang tersedia	21 jenis	21 jenis	8.500.000	18 jenis	7.660.000	16 jenis	6.950.000	15 jenis	6.500.000	15 jenis	6.700.000	15 jenis	6.700.000		
						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	3 jenis	3 jenis	2.550.000	3 jenis	3.000.000	3 jenis	3.000.000	3 jenis	3.500.000	3 jenis	3.800.000	3 jenis	3.800.000		
						Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum	2 jenis	2 jenis	15.815.600	2 jenis	16.000.000	2 jenis	16.500.000	2 jenis	17.000.000	2 jenis	17.500.000	2 jenis	17.500.000		
						Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pegawai yang difasilitasi dalam kunjungan kerja dalam daerah	17 orang	17 orang	14.600.000	11 orang	16.400.000	15 orang	17.350.000	15 orang	19.200.000	15 orang	22.450.000	15 orang	22.450.000		
						Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai yang di fasilitasi dalam kunjungan kerja luar daerah	11 orang	11 orang	22.500.000	14 orang	27.500.000	14 orang	28.700.000	14 orang	29.300.000	15 orang	32.000.000	15 orang	32.000.000		
						Penyediaan Peralatan dan bahan pembersih	Jumlah alat dan bahan kebersihan	8 jenis	8 jenis	750.000	10 jenis	1.240.000	10jenis	1.470.000	9 jenis	1.670.000	12 jenis	1.780.000	12 jenis	1.780.000		
			1	20	02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>174.480.000</b>	<b>80%</b>	<b>213.900.000</b>	<b>80%</b>	<b>213.760.000</b>	<b>80%</b>	<b>219.425.000</b>	<b>80%</b>	<b>236.450.000</b>	<b>80%</b>	<b>236.450.000</b>	Sekretariat	Kec. Bagor
						Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	6 unit	6 unit	34.000.000	5 unit	27.400.000	5 unit	28.400.000	4 unit	30.250.000	5 unit	34.300.000	5 unit	34.300.000		
						Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang tersedia	2 unit	2 unit	17.800.000	2 unit	19.400.000	2 unit	21.800.000	2 unit	23.600.000	2 unit	25.700.000	2 unit	25.700.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							Tar-get	Rp (000)	Tar-get	Rp (000)	Tar-get	Rp (000)	Tar-get	Rp (000)	Tar-get	Rp (000)	Tar-get			Rp (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang tersedia	5 unit	3 unit	35.200.000	2 unit	42.800.000	1 unit	32.800.000	2 unit	34.600.000	2 unit	38.300.000	2 unit	38.300.000		
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang tersedia	2 Jenis	2 jenis	36.800.000	2 jenis	38.700.000	3 jenis	42.000.000	3 jenis	43.400.000	2 jenis	46.800.000	2 jenis	46.800.000		
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah BBM, Pemeliharaan, Her, Suku Cadang yang dilakukan	4 jenis	4 jenis	39.580.000	4 jenis	40.800.000	4 jenis	41.760.000	4 jenis	42.300.000	4 jenis	43.650.000	4 jenis	43.650.000		
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilakukan	1 jenis	1 jenis	5.000.000	2 jenis	6.800.000	2 jenis	7.000.000	2 jenis	7.600.000	2 jenis	7.800.000	2 jenis	7.800.000		
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung yang dilakukan	1 jenis	1 jenis	1.500.000	2 jenis	2.000.000	2 jenis	2.200.000	2 jenis	2.400.000	2 jenis	2.400.000	2 jenis	2.400.000		
				Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah pemeliharaan mebeleur yang dilakukan	3 jenis	2 Jenis	4.600.000	1 jenis	3.400.000	1 jenis	2.800.000	1 jenis	3.275.000	2 jenis	3.800.000	2 jenis	3.800.000		
				Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehabilitasi kerusakan gedung kantor	4 ruangan	0	0	1 ruangan	32.600.000	1 ruangan	35.000.000	1 ruangan	32.000.000	1 ruangan	33.700.000	1 ruangan	33.700.000		
			1 20 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Tersusunnya dokumen ikhtisar laporan keuangan, dokumen perencanaan, Dokumen pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja</b>	<b>6 DOKUMEN</b>	<b>6 DOKUMEN</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6 DOKUMEN</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6 DOKUMEN</b>	<b>8.000.000</b>	<b>6 DOKUMEN</b>	<b>9.000.000</b>	<b>6 DOKUMEN</b>	<b>9.000.000</b>	<b>6 DOKUMEN</b>	<b>9.000.000</b>	<b>Sekretariat</b>	
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah Dokumen yang tersusun	3 dokumen	3 dokumen	2.000.000	3 dokumen	3.000.000	3 dokumen	3.000.000	3 dokumen	4.000.000	3 dokumen	4.000.000	3 dokumen	4.000.000		
				Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran	Jumlah dokumen yang tersusun	3 dokumen	3 dokumen	2.000.000	3 dokumen	2.000.000	3 dokumen	2.000.000	2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	2.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							Tar-get	Rp (000)	Tar-get	Rp (000)	Tar-get	Rp (000)	Tar-get	Rp (000)	Tar-get	Rp (000)	Tar-get	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Penyusunan Pelaporan Prognosis dan Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	1.200.000	2 Dokumen	1.200.000	2 Dokumen	1.200.000	2 dokumen	1.200.000	2 Dokumen	1.200.000		
				Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	500.000	2 Dokumen	800.000	2 Dokumen	800.000	2 Dokumen	800.000	2 Dokumen	800.000	2 Dokumen	800.000		
				Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000		
				<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Jumlah peningkatan tingkat kedisiplinan ASN</b>	<b>50 Org</b>	<b>50 Org</b>	<b>32.200.000</b>	<b>50 Org</b>	<b>31.600.000</b>	<b>50 Org</b>	<b>29.600.000</b>	<b>50 Org</b>	<b>27.600.000</b>	<b>50 Org</b>	<b>26.300.000</b>	<b>50 Org</b>	<b>26.300.000</b>		
				Pelaksanaan senam kesegaran jasmani	Jumlah pelaksanaan senam	48 kali	50 org	7.200.000	50 org	9.600.000	60 org	9.600.000	60 org	9.600.000	60 org	9.600.000	60 org	9.600.000		
				Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Tercapainya jumlah aparatur yang mampu mengoperasikan sistem informasi layanan publik	-	1 jenis	25.000.000	1 jenis	22.000.000	1 jenis	20.000.000	1 jenis	18.000.000	1 jenis	16.700.000	1 jenis	16.700.000		
				<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Jumlah ASN yang mengikuti lokakarya/seminar</b>	<b>-</b>	<b>15 org</b>	<b>12.700.000</b>	<b>18 org</b>	<b>13.500.000</b>	<b>18 org</b>	<b>13.500.000</b>	<b>18 org</b>	<b>14.700.000</b>	<b>18 org</b>	<b>15.000.000</b>	<b>18 org</b>	<b>15.000.000</b>		
				Seminar dan lokakarya	Rata rata nilai SKP ASN	-	15 org	12.700.000	18 org	13.500.000	18 org	13.500.000	18 org	14.700.000	18 org	15.000.000	18 org	15.000.000		
				<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>	<b>Prosentase hasil koordinasi di bidang : Pemerintahan, Kesra ,Trantibum ,Sarpras dan Pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti</b>	<b>67%</b>	<b>70%</b>	<b>329.267.700</b>	<b>73%</b>	<b>401.680.400</b>	<b>75%</b>	<b>415.662.500</b>	<b>78%</b>	<b>427.752.500</b>	<b>74%</b>	<b>441.092.500</b>	<b>76%</b>	<b>441.092.500</b>	<b>Camat</b>	<b>Kec. Bagor</b>
				Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa/Kelurahan	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	3 kali	2 kali	65.000.000	2 kali	82.600.000	2 kali	84.700.000	2 kali	85.000.000	2 kali	87.400.000	2 kali	87.400.000	Kasi Tata Pemerintahan	
				Pembinaan Sepuluh Program Pokok PKK	Jumlah lembaga yang terbina	1 lembaga	1 lembaga	35.482.500	1 lembaga	35.482.500	1 lembaga	35.482.500	1 lembaga	35.482.500	1 lembaga	35.482.500	1 lembaga	35.482.500	Kasi PMD	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							Tar-get	Rp (000)	Tar-get	Rp (000)	Tar-get	Rp (000)	Tar-get	Rp (000)	Tar-get	Rp (000)	Tar-get			Rp (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Peringatan Hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan	Jumlah kegiatan peringatan hari besar yang dilaksanakan	13 keg	13 keg	25.000.000	13 keg	62.540.000	13 keg	63.600.000	13 keg	64.860.000	13 keg	65.460.000	13 keg	65.460.000	Kasi PMD	
				Penyusunan monografi kecamatan dan fasilitasi penyusunan profil desa	Jumlah dokumen yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	8.300.000	2 Dokumen	7.300.000	2 Dokumen	7.300.000	2 dokumen	7.300.000	2 dokumen	7.300.000	2 dokumen	7.300.000	Kasi PMD	
				Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah peserta yang hadir dan dokumen yang tersusun	100 org , 1 Dok	100 org & 1 Dok	14.980.000	100 org & 1 Dok	15.860.000	100 org & 1 Dok	16.500.000	100 Org & 1 Dok	17.400.000	100 Org & 1 Dok	18.300.000	100 org & 1 Dok	18.300.000	Kasi PMD	
				Fasilitasi musrenbang desa/kelurahan	Jumlah kegiatan fasilitasi	21 kali	21 kali	2.850.000	21 kali	3.800.000	21 kali	4.000.000	21 kali	4.280.000	21 kali	4.860.000	21 kali	4.860.000	Kasi PMD	
				Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	38 kali	38 kali	28.300.000	38 kali	30.850.000	38 kali	32.750.000	38 kali	34.600.000	38 kali	36.480.000	38 kali	36.480.000	Kasi Tata Pemerintahan	
				Koordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat	Jumlah peserta koordinasi dan pembinaan	70 org	60 org	27.540.000	60 org	32.870.000	60 org	34.650.000	60 org	36.480.000	60 org	37.200.000	60 org	37.200.000	Kasi Kesmas	
				Pembinaan dan Pemantauan Pendapatan Daerah	Jumlah orang yang dibina	65 org	60 org	31.655.200	60 org	33.237.900	60 org	34.600.000	60 org	35.870.000	60 org	36.340.000	60 org	36.340.000	Kasi Kesmas	
				Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat	Jumlah koordinasi dan pengendalian	14 kali	14 kali	29.720.000	14 kali	32.840.000	14 kali	34.280.000	14 kali	35.000.000	14 kali	36.340.000	14 kali	36.340.000	Kasi Trantib	
				Koordinasi dan pembinaan bidang sarpras	Jumlah koordinasi dan pembinaan bidang sarpras	0	12 kali	21.640.000	12 kali	23.450.000	12 kali	24.500.000	12 kali	25.000.000	12 kali	26.860.000	12 kali	26.860.000	Kasi Sarpras	
				Pelestarian adat	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	0	2 kegiatan	13.800.000	2 kegiatan	14.370.000	2 kegiatan	15.000.000	2 kegiatan	16.480.000	2 kegiatan	17.600.000	2 kegiatan	17.600.000	Kasi PEM	
				Pembinaan Linmas dan Satpol PP	Jumlah linmas dan Pol PP yang dibina	110 org	105 org	25.000.000	105 org	26.480.000	105 org	28.300.000	105 org	30.000.000	105 org	31.470.000	105 org	31.470.000	Kasi Trantib	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							Tar-get	Rp (000)	Tar-get	Rp (000)	Tar-get	Rp (000)	Tar-get	Rp (000)	Tar-get	Rp (000)	Tar-get			Rp (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				<b>Program Peningkatan Kinerja Kelurahan (13 Program)</b>	<b>Nilai SKM (Survei kepuasan masyarakat)Kelurahan...</b>	<b>0</b>	<b>Baik</b>	<b>800.000.000</b>	<b>Baik</b>	<b>915.000.000</b>	<b>Baik</b>	<b>980.000.000</b>	<b>Baik</b>	<b>1.045.000.000</b>	<b>Baik</b>	<b>1.170.000.000</b>	<b>Baik</b>	<b>1.210.000.000</b>	<b>Lurah</b>	
				<b>Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Kedondong</b>	<b>Nilai IKM</b>	<b>1</b>	<b>baik</b>	<b>390.000.000</b>	<b>Baik</b>	<b>455.000.000</b>	<b>Baik</b>	<b>485.000.000</b>	<b>Baik</b>	<b>515.000.000</b>	<b>Baik</b>	<b>575.000.000</b>	<b>Baik</b>	<b>595.000.000</b>		
				Penyediaan Operasional Rutin Perkantoran	Jumlah kegiatan Rutin	0	8 keg	100.000.000	8 kegiatan	125.000.000	8 kegiatan	130.000.000	8 kegiatan	135.000.000	8 kegiatan	140.000.000	8 kegiatan	140.000.000		
				Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan prasarana yang terbangun	0	2 unit	150.000.000	2 unit	170.000.000	2 unit	180.000.000	2 unit	200.000.000	2 unit	250.000.000	2 unit	250.000.000		
				Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemsyarakatan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan jumlah kelembagaan	0	2 keg & 6 Lbg	140.000.000	2 keg & 6 Lbg	160.000.000	2 keg & 6 Lbg	175.000.000	2 Keg & 6 Lbg	180.000.000	2 keg & 6 Lbg	185.000.000	2 keg & 6 Lbg	185.000.000		
				<b>Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Guyangan</b>	<b>Nilai IKM</b>	<b>0</b>	<b>baik</b>	<b>410.000.000</b>	<b>baik</b>	<b>460.000.000</b>	<b>baik</b>	<b>495.000.000</b>	<b>baik</b>	<b>530.000.000</b>	<b>baik</b>	<b>595.000.000</b>	<b>baik</b>	<b>615.000.000</b>		
				Penyediaan Operasional Rutin Perkantoran	Jumlah Kegiatan Rutin	0	8 Keg	100.000.000	8 kegiatan	130.000.000	8 kegiatan	135.000.000	8 kegiatan	140.000.000	8 kegiatan	145.000.000	8 kegiatan	145.000.000		
				Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan prasarana yang terbangun	0	2 unit	160.000.000	2 unit	170.000.000	2 unit	180.000.000	2 unit	200.000.000	2 unit	250.000.000	2 unit	250.000.000		
				Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemsyarakatan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan jumlah kelembagaan	0	2 keg & 6 Lbg	150.000.000	2 keg & 6 Lbg	160.000.000	2 keg & 6 Lbg	180.000.000	2 Keg & 6 Lbg	190.000.000	2 Keg & 6 Lbg	200.000.000	2 Keg & 6 Lbg	220.000.000		
				<b>Program Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan</b>	<b>Prosentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik</b>	<b>100%</b>	<b>naik 0,03</b>	<b>87.444.000</b>	<b>kenaikan angka 0,03</b>	<b>91.504.000</b>	<b>kenaikan angka 0,03</b>	<b>96.352.000</b>	<b>kenaikan angka 0,03</b>	<b>100.392.250</b>	<b>kenaikan angka 0,03</b>	<b>103.047.450</b>	<b>kenaikan angka 0,03</b>	<b>103.047.450</b>	<b>Camat</b>	<b>Kec. Bagor</b>



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD				
							Tar-get	Rp (000)	Tar-get	Rp (000)	Tar-get	Rp (000)	Tar-get	Rp (000)	Tar-get	Rp (000)	Tar-get	Rp (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				<b>dan Pemberdayaan Masyarakat</b>																	
				Pembinaan tata kelola perencanaan, keuangan, aset, dan pertanggung jawaban desa	Tercapainya jumlah Pembinaan tata kelola perencanaan, keuangan dan aset serta pertanggungjawaban keuangan desa	2 kegiatan	2 kegiatan	14.544.000	2 kegiatan	14.544.000	2 kegiatan	15.544.000	2 kegiatan	15.544.000	2kegiatan	15.544.000	2 kegiatan	15.544.000	Kasi PEM		
				Pembinaan administrasi dan data desa	Jumlah Kegiatan pembinaan administrasi dan data desa yang dilaksanakan	4 Keg	4 Keg	13.400.000	4 keg	14.075.000	4 keg	14.778.750	4 keg	15.517.600	4 keg	16.293.450	4 keg	16.293.450	Kasi PEM		
				Monitoring evaluasi kinerja pemerintah desa	Jumlah kegiatan monitoring evaluasi kinerja pemerintah desa yang dilaksanakan	4 keg	4 keg	13.800.000	4 keg	14.900.000	4 keg	15.645.000	4 keg	16.427.250	4 keg	17.248.600	4 keg	17.248.600	Kasi PEM		
				Pembinaan lingkungan sehat	Jumlah lingkungan RT/RW/sekolah yang berwawasan lingkungan	532 RT,131 RW 49 Sklh	532 RT,131 RW 49 Sklh	45.700.000	532 RT,131 RW 49 Sklh	47.985.000	532 RT,131 RW 49 Sklh	50.384.250	532 RT,131 RW 49 Sklh	52.903.400	532 RT,131 RW 49 Sklh	53.961.400	532 RT,131 RW 49 Sklh	53.961.400	Kasi PMD		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Bagor bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2018-2023 yaitu terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang prima berlandaskan iman dan taqwa. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Bagor dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2018 - 2023 sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih,
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah,
3. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah,
4. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah,
5. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak,
6. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung *stakeholders* (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum.

Sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Bagor sebagaimana tercantum dalam Perda Nomor 9 Tahun 2008, indikator – indikator capaian kinerja yang dapat dikontribusikan dalam : indikator – indikator di RPJMD Kabupaten Nganjuk merupakan indikator dukungan terhadap indikator – indikator yang terdapat pada masing – masing OPD penanggung jawab program. Indikator kinerja dari dokumen ini terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu:

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- b. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

### **7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi..

Adapun Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Bagor adalah

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.



**Tabel 7.1****Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Bagor**

No	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun -0 2018	Tahun -1 2019	Tahun-2 2020	Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan masyarakat	Nilai SKM Pelayanan Kecamatan	83	84	85	86	87	88	88
2	Prosentase desa / kelurahan yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar	19 Desa / 2 Kelurahan	78 %	79 %	80 %	81 %	82 %	83 %	83 %

## **7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) berfungsi untuk membantu Organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan – tujuan OPD

adapun indikator Kinerja Kunci ( IKK) dari kecamatan Bagor adalah : Laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepada masyarakat

- a. Laporan administrasi dan dokumen pertanggung jawaban desa yang baik dan berkualitas
- b. Laporan Administrasi dan dokumen pertanggung jawabban desa baik dan berkualitas

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Kunci Kantor Kecamatan Bagor**

No	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun-0 2018	Tahun -1 2019	Tahun-2 2020	Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan surat menyurat	1920	1985	2035	2090	2150	2210	2150
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana yang baik	76 %	78 %	79 %	80 %	82 %	82 %	82 %
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	80 %	82 %	83 %	84 %	85 %	85 %	85 %
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah peningkatan kedisiplinan ASN	0%	91%	92%	93%	94%	95%	95%
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Nilai SKP ASN	0	75	76	78	80	82	82
6	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	80 %	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %	85 %
7	Program Pembinaan Pemerintahan Desa / Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Desa / Kelurahan yang menjalankan Tata Kelola pemerintahan yang baik	78 %	79 %	80 %	81 %	82 %	83 %	83 %
8	Program Peningkatan kinerja kelurahan ( 2 kelurahan)	Jumlah peningkatan kinerja 2 kelurahan	0	75 %	78 %	80 %	81 %	82 %	82 %

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra OPD ) digunakan sebagai pedoman melaksanakan Tujuan, Sasaran, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja ( Renja OPD ) dan Rencana Kerja Tahunan ( RKT ).

Perencanaan Stategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah lainnya berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

CAMAT BAGOR



**K A S N O, S.Sos**

Penata Tk. I

NIP. 19630317 198202 1

003